



DIMENSI PENAWARAN, PERMINTAAN, SERTA PENETRASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN ULTRA MIKRO WILAYAH MALUKU SERTA PENGARUH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEKTOR EKONOMI

Iwan Teguh Setiawan¹, Thedy Dwi Prasetyo², Aginta Genius³,
Immanuel Budi Utomo⁴, Azizah Nur Rhamadani⁵

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Denpasar

²Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Bengkulu

^{3, 4, 5}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ambon

Alamat Korespondensi: thedy17@gmail.com

Abstract

Financial inclusion provides financial access in the form of convenience, security and convenience of transactions for meeting capital needs to groups of people with low incomes or do not have access to banking services. Two forms of financial inclusion services provided by the government are people's business credit (KUR) and ultra micro financing (UMi). This study used a quantitative method approach with a statistical approach and a public sentiment approach. The results of the study stated that the human development index (HDI) of the expenditure sector had a positive and significant correlation with GRDP per capita in the Maluku region and the distribution of government-owned KUR and UMi. In addition, there is a factor that has a fairly high correlation with the value of the distribution of KUR owned by the government, namely the number of cooperatives in the Maluku region. Based on the results of this study, it is hoped that the government of Indonesia can strengthen the scheme and mechanism for distributing KUR and UMi with various policies, especially through a direct approach to the community, one of which is through cooperatives. The government's credit distribution policy through cooperatives has the potential to leverage the economy and the community's business capacity as well as to increase the potential for expansion of KUR according to the economic growth target.

Abstrak

Inklusi keuangan menyediakan akses finansial dalam bentuk kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi atas pemenuhan kebutuhan modal kepada para kelompok masyarakat dengan pendapatan bawah atau tidak memiliki akses layanan perbankan. Dua bentuk layanan inklusi keuangan yang disediakan oleh pemerintah yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan statistika serta pendekatan *sentiment* masyarakat.



Hasil penelitian menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) sektor pengeluaran memiliki korelasi positif dan signifikan dengan PDRB per kapita wilayah Maluku serta penyaluran KUR dan UMi milik pemerintah. Selain itu, terdapat faktor yang berkorelasi cukup tinggi atas nilai penyaluran KUR milik pemerintah yakni jumlah koperasi di wilayah Maluku. Atas hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperkuat skema dan mekanisme penyaluran KUR maupun UMi dengan berbagai variasi kebijakan terutama melalui strategi pendekatan langsung kepada masyarakat salah satunya melalui koperasi. Kebijakan penyaluran kredit pemerintah melalui koperasi berpotensi untuk *me-leverage* ekonomi dan kemampuan usaha masyarakat maupun meningkatkan potensi perluasan KUR sesuai target pertumbuhan ekonomi.

Keywords: indeks pembangunan manusia, koperasi, kredit usaha rakyat, pembiayaan, usaha mikro kecil

JEL Classification: C1, C3, E6, G3

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu wilayah perlu diukur untuk melihat kesinambungan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat di masa depan terutama dalam melihat hubungan antar faktor pendukung khusus yang membentuk kemajuan tersebut. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi salah satu indikator atas kemajuan suatu wilayah yang terukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pengeluaran tentunya dengan nilai nominal positif dan meningkat di setiap periode pengukuran. Ekonomi pengeluaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi melalui unsur ekonomi melalui belanja atau pengeluaran baik publik maupun privat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi tingkat pembangunan manusia. Menurut Badan

Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin (0,32%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selama 2010-2021, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,74%. Peningkatan IPM Maluku tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal tersebut berbeda dengan peningkatan IPM Maluku di tahun 2020 dimana hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak terjadi penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat sebesar 0,44% (Hamimah & Zulkarnain, 2020). Salah satu indikator keberhasilan suatu negara menurut Todaro & Smith (2012)

adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi (Adriani & Wiksuana, 2018; Sari et al., 2016). Jika dilihat dari sisi indikator tersebut dapat disiratkan bahwa akumulasi modal sebagai faktor usaha berpengaruh cukup besar selain dari pengaruh adopsi teknologi yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan IPM memiliki program pembiayaan berbentuk kredit usaha rakyat (KUR) maupun pembiayaan ultra mikro (UMi) yang disalurkan kepada debitur di seluruh Indonesia dengan mekanisme *channeling* usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan dari program pembiayaan tersebut secara khusus adalah meningkatkan (*leverage*) tingkat modal masyarakat level piramida bawah atau yang tidak dapat tersentuh oleh sistem perbankan sehingga kelompok masyarakat tersebut dapat tumbuh (usaha) mandiri secara ekonomi (Dahrani et al., 2022). Program KUR diluncurkan pertama kali pada tanggal 5 November 2007 melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. Penyaluran KUR di wilayah Maluku dilakukan melalui beberapa bank umum yakni BRI, BNI, BTN, Mandiri, BPD Maluku Malut. Pembiayaan UMKM tidak hanya dilakukan menggunakan subsidi bunga KUR dari pemerintah saja tetapi masing-masing pihak perbankan

tersebut juga memiliki program pembiayaan UMKM tersendiri seperti KUR menengah perbankan, KUR mikro perbankan, KUR kecil perbankan sehingga KUR dengan subsidi bunga pemerintah ikut bersaing porsi di dalam penyaluran UMKM wilayah Maluku. Sedangkan mekanisme penyaluran UMi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Skema pembiayaan UMi dilakukan melalui lembaga penyalur meliputi lembaga keuangan bukan bank (LKBB), badan layanan umum (BLU)/badan layanan umum daerah (BLUD), dan koperasi simpan pinjam. Pada wilayah Maluku penyaluran UMi dilakukan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian (Persero).

Menurut Muchlis (2017) atas kondisi bertahannya UMKM dalam menghadapi krisis dan kondisi ekonomi yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya UMKM terhadap perekonomian nasional. Peran penting usaha kecil menengah khususnya pada *emerging market* selalu dikaitkan pada masalah ekonomi dan sosial yakni kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketimpangan lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, keberadaan UMKM diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Refleksi atas ketangguhan UMKM secara riil dapat dilihat dari bertahannya UMKM terhadap terpaan badai pandemi Covid-19 yang terjadi mulai tahun 2020 yang meruntuhkan perekonomian dunia sampai regional. Keberadaan UMKM diestimasi cukup kuat dalam menopang ekonomi sektor riil sehingga pelemahan

ekonomi tidak berdampak cukup dalam jika dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hipotesis terkait pengaruh penyaluran kredit pemerintah yakni terdapat hubungan atau korelasi cukup kuat antara IPM dengan penyaluran kredit pemerintah dalam bentuk KUR dan UMi dalam lingkup wilayah Maluku serta pengaruh jumlah pembiayaan kredit pemerintah tersebut terhadap porsi pembiayaan kredit milik perbankan (Hia et al., 2021). Hal lain yang ingin diungkap dalam penelitian ini yakni menentukan faktor yang dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit pemerintah (nominal maupun jumlah debitur) dan terhadap *awareness* masyarakat akan keberadaan pembiayaan KUR dan UMi terutama dilakukan melalui fasilitas *online* (jaringan internet). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas penyusunan kebijakan pemerintah dalam perluasan dan penajaman penyaluran kredit pemerintah dan juga pendekatan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Sari & Falianty (2021), tidak ada dampak yang signifikan antara inklusi keuangan dan struktur keuangan. Selain itu, struktur keuangan tidak berdampak signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Namun signifikansi arah negatif hanya terjadi pada provinsi dengan IPM kategori tinggi, inklusi keuangan dan struktur keuangan terhadap ketimpangan pendapatan sehingga kebijakan

mengenai inklusi keuangan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan perlu memperhatikan karakteristik setiap wilayah, khususnya kualitas sumber daya manusia.

Menurut Jauch & Watzka (2016), pengembangan inklusi keuangan memiliki efek positif terhadap kesenjangan pendapatan dengan peningkatan sebuah persetujuan kredit sebesar 10% berpengaruh pada peningkatan koefisien gini sebesar 0,23 poin.

Menurut Fouejieu et al. (2020) terkait inklusi keuangan dan kesenjangan kesejahteraan dalam bentuk analisa antar negara menyatakan adanya korelasi negatif antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, dampak inklusi keuangan pada ketimpangan tampaknya lebih kuat di negara berkembang. Tingkat inflasi tidak ditemukan memiliki efek yang jelas pada tingkat ketimpangan. Namun, keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan penduduk berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan.

Raji (2021) menyatakan bahwa otoritas ekonomi dalam rangka mencapai dan mempertahankan pertumbuhan yang adil, dibutuhkan kebijakan disiplin sepenuhnya yang dapat mempromosikan dan meningkatkan inklusi keuangan serta pertumbuhan inklusif dari sebagian besar populasi tidak boleh dikelola dan ditangani dengan tangan kosong. Otoritas harus menetapkan kebijakan peningkatan pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan,

perbaikan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta akses ke layanan keuangan untuk memacu pembangunan inklusif dari pertumbuhan ekonomi. Hal terpenting, pihak berwenang harus memperkuat supremasi hukum dan penegakan yang ketat dari serangkaian peraturan minimum yang diperlukan. Ummah et al. (2018) menyatakan bahwa rata-rata tingkat inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia bernilai rendah yakni berkisar antara 0,1-0,33, kecuali khusus Provinsi Jakarta yang bernilai tinggi mencapai 0,8. Hasil analisa dari Beck et al. (2007) atas penelitian keterkaitan antara distribusi pendapatan dengan pendapatan masyarakat kelas bawah serta pembangunan sektor keuangan dengan sampel data 72 negara dalam periode 45 tahun melalui metode *generalized method of moments* (GMM) yakni peningkatan infrastruktur keuangan memiliki efek positif dalam mendorong ekonomi masyarakat kelas bawah atau miskin.

Menurut Adam (2018), di dalam artikel pelibatan koperasi dalam program KUR: sebuah inovasi kebijakan ekonomi dengan peluang dan tantangannya menyatakan bahwa pelibatan koperasi sebagai wadah penyaluran KUR membuka potensi dan peluang sekaligus tantangan dalam proses perbaikan kinerja dan tata pelaksanaan KUR sebagai bentuk lembaga ekonomi yang sangat dekat serta sangat memahami atas permasalahan dan kebutuhan UMKM. Fox (2015) menyatakan metode analisis regresi *ordinary least square* (OLS) menyesuaikan bidang regresi pada data yang diasumsikan memiliki tren linier. Meskipun bidang regresi tidak

menyentuh setiap titik data, model OLS memodelkan hubungan parsial antara setiap kemiringan (yaitu, setiap koefisien regresi "b") dan variabel hasil, dengan mempertahankan efek dari variabel yang tersisa. Dengan demikian, koefisien regresi dalam OLS diperkirakan dengan meminimalkan jumlah *error squared* antara nilai yang pada regresi dengan nilai yang diamati.

Turney (2002) dan Pang & Lee (2004) menyatakan bahwa *sentiment analysis* sebagai bagian dari proses *natural language processing* (NLP) pada seluruh titik *granular*. Metode tersebut digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis opini-opini individual maupun grup berdasarkan mekanisme *skoring* sebagai bagian dari proses *machine learning*.

METODE PENELITIAN

Pada tahap awal penelitian menggunakan 20 variabel independen yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap nilai IPM wilayah Maluku (variabel dependen) sehingga dapat digunakan untuk penentuan model yang *robust* serta dapat memenuhi *best linear unbiased prediction* (BLUP) dan *best linear unbiased estimation* (BLUE) dengan tiga asumsi dasar yakni a) tidak terjadi autokorelasi; b) tidak ada multikolinearitas; c) tidak terdapat heteroskedastisitas. Selain itu, penggunaan 77 data *series* sudah memenuhi standar olah data sesuai dengan teori *central limit theorem* (CLT) dengan minimal kecukupan sampel sejumlah 30 sampel. Di dalam menentukan variabel regresi sesuai dengan kriteria BLUE digunakan 20 variabel penentu untuk dijadikan putusan olah model regresi. Variabel

Tabel 1 Variabel Penelitian yang Digunakan Tahap Awal

Data	Definisi	Sumber
Wilayah (kode wilayah)	Wilayah Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota	Kementerian Keuangan
Debitur KUR UMi	Jumlah debitur KUR dan UMi pendanaan pemerintah RI	Kementerian Keuangan
Nominal penyaluran KUR UMi	Nilai penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku	Kementerian Keuangan
IPM pengeluaran	IPM dengan penggunaan pada sektor pengeluaran	BPS
Jumlah bank umum	Jumlah bank umum yang terdapat di Maluku	BPS dan BI
Jumlah bank perkreditan rakyat (BPR)	Jumlah BPR yang ada di Maluku	BPS dan BI
Jumlah lembaga pembiayaan	Jumlah lembaga pembiayaan yang ada di Maluku	BPS dan OJK
KUR khusus bank umum	Nilai KUR khusus milik bank umum yang disalurkan oleh bank-bank umum	BPS
KUR mikro khusus bank umum	Nilai KUR Mikro milik bank umum yang disalurkan oleh bank-bank umum	BPS
KUR kecil bank umum	Nilai KUR Kecil milik bank umum yang disalurkan oleh bank-bank umum	BPS
KUR menengah bank umum	Nilai KUR Menengah milik bank umum yang disalurkan oleh bank-bank umum	BPS
Jumlah koperasi	Jumlah koperasi yang ada di Maluku	BPS
PDRB per kapita	Nilai PDRB per kapita per kabupaten/kota wilayah Maluku	BPS
Tingkat kemiskinan (persentase)	Tingkat kemiskinan wilayah Maluku berdasarkan persentase	BPS
Jumlah usaha mikro kecil	Jumlah usaha level mikro dan kecil wilayah Maluku	BPS
Inflasi regional	Tingkat inflasi wilayah Maluku yang dengan proksi tingkat inflasi Kota Ambon dan Kota Tual	BPS dan BI
Rasio gini	Rasio gini atas ketimpangan pendapatan yang digunakan <i>annual</i> setiap September	BPS

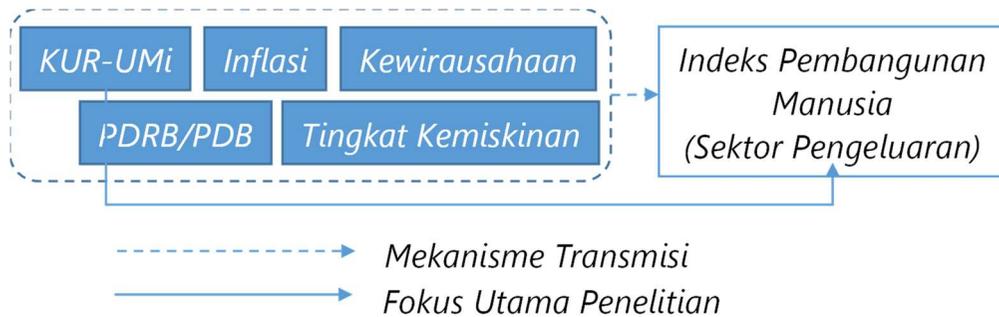
Sumber: Diolah Penulis

tidak bebas (*dependent variable*) yang digunakan adalah IPM sektor ekonomi sedangkan variabel lainnya adalah variabel bebas (*independent variable*). Variabel-variabel bebas tersebut dijadikan sebagai kandidat regresi dikarenakan secara teori memiliki hubungan korelasi dengan IPM sektor ekonomi.

Data panel penelitian disusun dalam periode tahunan (*annual*) menggunakan data sekunder dengan periode data

mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dengan sumber data dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, dan sumber terpercaya lainnya. Data-data yang digunakan berupa produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat inflasi, tingkat ketimpangan kemiskinan (rasio gini), tingkat kemiskinan, IPM, pembiayaan KUR dan pembiayaan UMi.

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

Objek dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota wilayah Maluku, yakni: Kota Tual, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Buru Selatan.

Data panel atau dapat disebut *cross-sectional time-series* data digunakan di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat korelasi indikator secara horizontal (periode/waktu) serta vertikal (level regional kabupaten kota) serta karakteristik penyusun komponen indikator. Selain itu, dapat dimungkinkan untuk dilakukan kontrol untuk variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau diobservasi secara mudah. Namun demikian, terdapat tantangan di dalam proses pembentukan data panel berupa kecukupan desain dan data *sampling*, respons minimal untuk skala mikro panel.

Dalam pengembangan penelitian dilakukan beberapa tahap yakni dimulai dari penggunaan *framework* teoritis seperti Gambar 1 untuk mendefinisikan

pengukuran atas indikator komposit dan kemudian dilanjutkan pada tahap pemilihan variabel. Variabel dipilih pada Tabel 1 merefleksikan tujuan atau pemenuhan hipotesis penelitian. Sebelumnya variabel yang digunakan harus dipastikan cenderung pada distribusi normal sesuai fungsi densitas:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Dengan kondisi rata-rata (*mean*) sama dengan '0' dan simpangan baku sama dengan '1. Transformasi data perlu dilakukan (Ln maupun Log) sebagai bagian dari normalisasi sehingga terbentuk *smoothing* data *series* pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Tahap selanjutnya dilakukan proses pengujian sesuai dengan metode *modeling* yang digunakan dalam penelitian yakni uji chow memiliki hipotesis: $H_0: \alpha_{0i} = \alpha_0$ (CEMD) dan H_1 : minimal ada satu intersep $\alpha_{0i} \neq \alpha_0$ (*fixed effect model/FEM*); $i = 1, 2, \dots, 11$ serta uji hausman untuk menentukan model yang lebih baik di antara FEM dan *random effect model/REM*. Pengujian hausman dilakukan dengan hipotesis $H_0 : corr(X_{it}, \varepsilon_{it}) = 0$ (model REM) $H_1 : corr(X_{it}, \varepsilon_{it}) \neq 0$ (model FEM).

Metode penelitian yang digunakan adalah *fixed effect* dan *random effect* dengan persamaan model awal *fixed effect* maupun *random effect*:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

Pengembangan model persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \gamma_2 E_2 + \dots + \gamma_n E_n + u_{it}$$

dimana $i = 1, 2, \dots, 11$; $t = 2015, \dots, 2021$. Berdasarkan atas persamaan struktural tersebut, maka akan dapat dipecahkan sebanyak n -variabel endogen dan diperoleh persamaan dalam bentuk tereduksi. Persamaan dengan bentuk tereduksi adalah suatu persamaan yang dapat menjelaskan variabel endogen hanya berdasarkan variabel eksogen dan residual stokastik.

Selain itu, penggunaan metode regresi linear *ordinary least squared* (OLS) maupun *generalized least squared* (GLS) digunakan dalam penelitian ini untuk membangun model atas pengaruh variabel independen terhadap kenaikan jumlah debitur program kredit pemerintah.

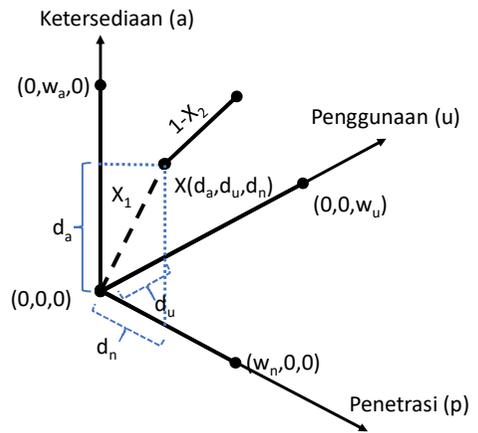
Model Dalam Penelitian:

Lingkup dalam regional Maluku

Kondisi penelitian ini juga dilakukan untuk melihat permintaan dan penawaran serta kondisi penetrasi pasar inklusi keuangan dimana menurut Sarma (2012) seperti pada Gambar 2, terdapat tiga vektor dimensi dalam indeks inklusi keuangan, yakni dimensi (1) ketersediaan atau penawaran atas layanan dengan indikator diantaranya ketersediaan jumlah bank atau lembaga penyalur (bank umum/lembaga penyalur keuangan/bank perkreditan),

ketersediaan outlet transaksi keuangan

Gambar 2 Vektor Tiga Dimensi Indeks Inklusi Keuangan

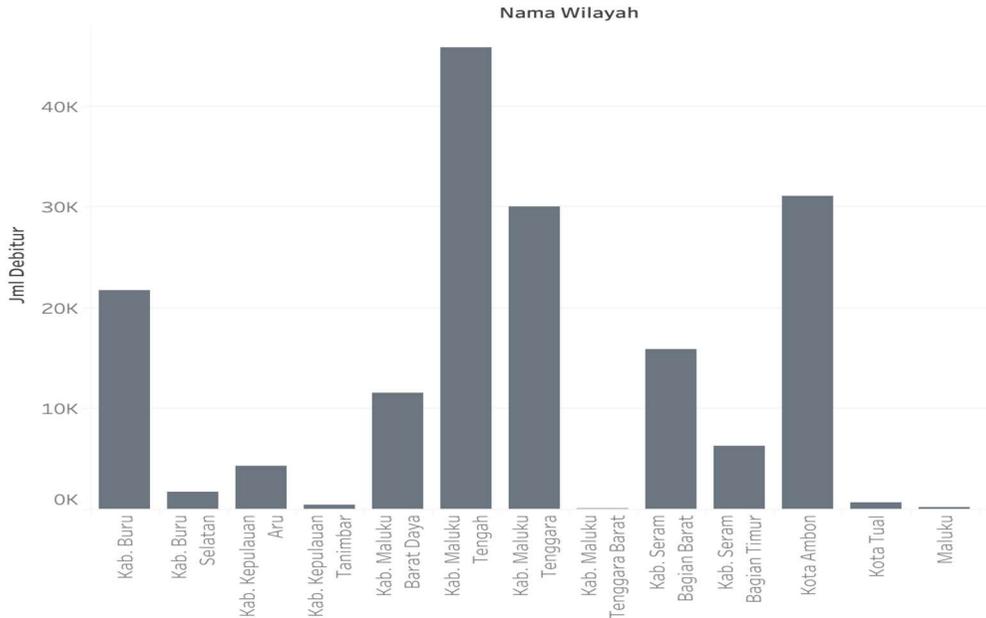


Sumber: Sarma (2012)

(ATM, layanan kliring dan transfer) yang tersedia per 1000 populasi, dimensi. Selain itu, penawaran dapat dilihat dari jumlah dana kredit program yang selalu disediakan pemerintah dalam bentuk subsidi KUR dan UMi kepada masyarakat; (2) kebutuhan atas penggunaan dana sektor inklusi, yakni pada kelompok masyarakat dengan tingkat keuangan *marginal* atau tidak dapat disentuh oleh layanan perbankan, dimensi; (3) adalah penetrasi (pasar) atas permintaan dan penawaran pendanaan sektor inklusi berupa masuknya tambahan pilihan atas pendanaan sektor inklusi (sektor pemerintah/perbankan/swasta) dilihat dari fitur kemudahan sistem layanan, bentuk transaksi, sistem penjaminan, dan beberapa fitur sebagai penetrasi pasar keuangan inklusi.

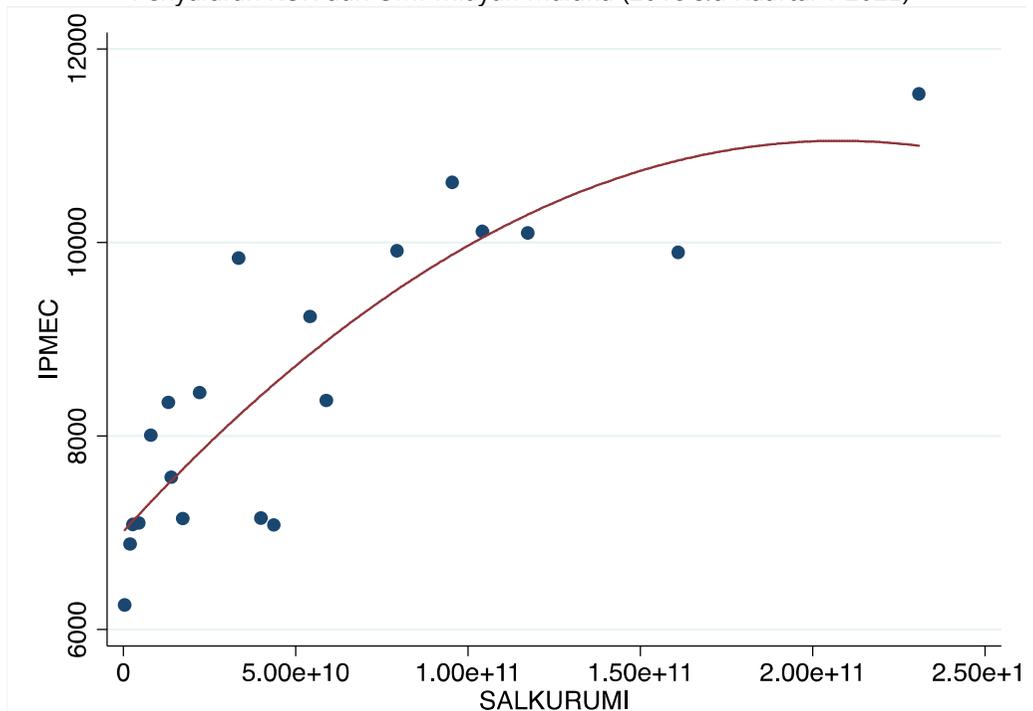
Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan eksplorasi dengan melihat analisa *trend* dan *influence* KUR dan UMi

Grafik 1 Perbandingan Jumlah Debitur Berdasarkan Kabupaten/Kota wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)



Sumber: Diolah Penulis

Grafik 2 Two-way binscatter (Noise reduced) antara IPM Pengeluaran dengan Nilai Penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)



Sumber: Diolah Penulis

sebagai bentuk *sentiment analysis* atas penawaran kredit program milik pemerintah melalui media internet dalam hal penilaian *social awareness* masyarakat regional Maluku maupun nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan penyaluran kredit pemerintah di wilayah Maluku terjadi setiap tahun dengan kenaikan tajam seperti Grafik 8 (lampiran) di tahun 2021 atau sekitar Rp5 miliar dengan sektor usaha mayoritas pinjaman adalah perdagangan besar dan eceran (55%). Besaran nilai penyaluran tersebut sebagai bagian dari kontribusi pembiayaan usaha dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi dan usaha Maluku walaupun kemungkinan terjadi *lag* atas dampak program penyaluran kredit.

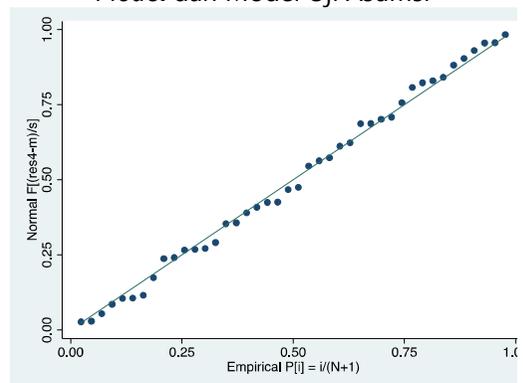
Berdasarkan Grafik 1 visualisasi data penyaluran KUR dan UMi 2018 s.d kuartal 1 2022 terlihat bahwa kabupaten dan kota besar di wilayah Maluku dengan sektor usaha utama yakni wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan sektor mayoritas perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan latar belakang, tujuan, penelitian dan literasi, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pembiayaan KUR dan UMi memiliki daya dorong terhadap IPM terutama pada sektor pengeluaran.

Selain itu, perlu untuk melihat hubungan tidak langsung antara pembiayaan KUR dan UMi dengan PDRB per kapita. Hal lainnya dalam penelitian

adalah dilakukan pengujian (vektor) atas dampak pembiayaan dalam bentuk KUR milik perbankan, infrastruktur perbankan dan penyaluran, serta jumlah usaha dan wirausaha.

Melalui Grafik 2 dapat terlihat hubungan kuat antara IPM pengeluaran dan nilai penyaluran kredit pemerintah (KUR dan UMi) wilayah Maluku dengan mayoritas berada di atas atau tepat dan mengikuti garis *threshold*. Jika dilihat dalam metode statistik, hubungan tersebut perlu diperhitungkan tidak hanya dengan variabel penyaluran KUR dan UMi namun diasumsikan terdapat variabel bebas lainnya yang dapat membentuk dan memiliki korelasi (secara teoritis) dengan IPM sektor ekonomi. Hasil uji normalitas data antar variabel penelitian (uji *shapiro-wilk*) dengan nilai *p-value* > 0,05 menunjukkan bahwa variabel dalam

Grafik 3 Normalitas Data antar Variabel dengan uji *Shapiro-Wilk* sebelum dilakukan proses Pemilihan *Best Fitted Model* dan Model Uji Asumsi

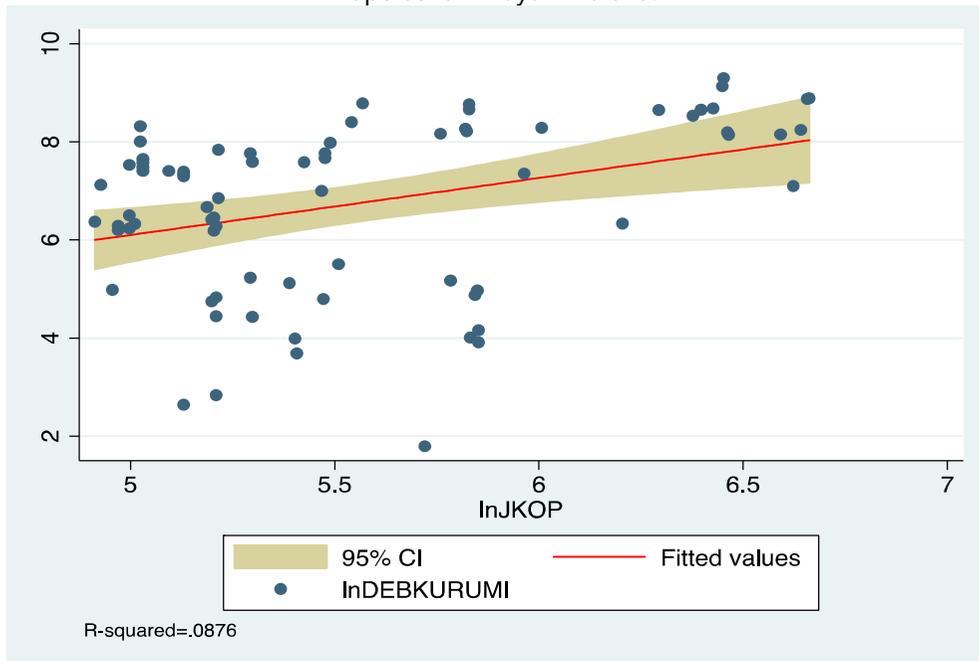


Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>
res4	42	0.98734	0.519	-1.382	0.9165

Sumber: Diolah Penulis

Grafik 4 *Slope R-square* antara Jumlah Debitur KUR dan UMi dengan Jumlah Koperasi di wilayah Maluku.



Sumber: Diolah Penulis

penelitian ini terdistribusi normal sesuai dengan Grafik 3.

Dari 20 variabel sesuai dengan tabel deskripsi statistik (Lampiran 1) bahwa hanya tiga variabel yang memiliki nilai korelasi signifikan ($P\text{-Value} < 0,05$) terhadap IPM yakni nilai penyaluran KUR dan UMi milik pemerintah RI, nilai penyaluran KUR milik perbankan (bank umum), serta jumlah wirausaha wilayah Maluku.

Dalam penentuan model regresi dilakukan penentuan model antara *fixed effect* dengan *random effect* antara IPM dengan ketiga independen variabel yakni nilai salur KUR UMi pemerintah (SALKURUMI), nilai KUR dari bank umum (KURBANKUM), dan jumlah wirausaha (JWIRAUsh).

Tabel 2 Hasil Regresi *Fixed Effect*

Variabel	Coef.	t-Stats	Prob.
SALKURUMI	2.43	3.47	0.001
lnKURBANKUM	81.46	5.04	0.000
JWIRAUsh	0.23	2.57	0.013
C	7207.8	43.84	0.000

Dependent Var.= IPMEC

Overall $R^2 = 0.5707$ Prob > F = 0.0001

Within $R^2 = 0.6215$

Between $R^2 = 0.6060$

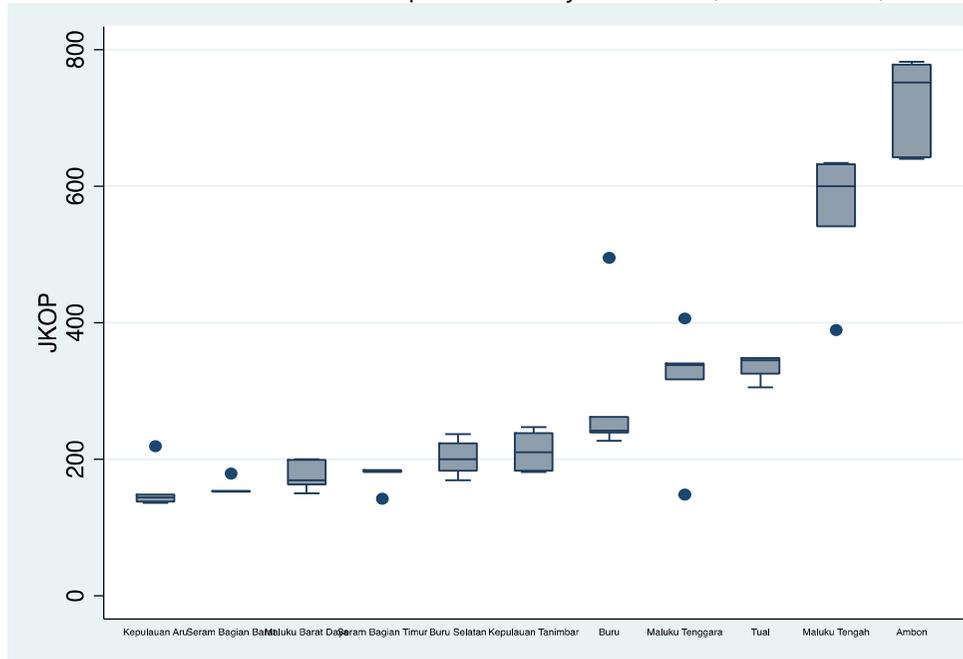
Vif = 3,66

*) hasil lengkap pada lampiran

Sumber: Diolah Penulis

Model persamaan regresi *generalized least squares* (GLS) data panel *fixed effect* pada Tabel 2 bebas dari *multicollinearity confident interval* 95% dengan nilai vif (*uncentered*) di bawah 10 (3,66) serta bebas dari heteroskedastik dengan nilai 0.0128 ($< \text{confident interval } 90\%$).

Grafik 5 *Box Plot* Jumlah Koperasi di Wilayah Maluku (2018 s.d 2021)



Sumber: Diolah Penulis

Model persamaan regresi GLS data panel *random effect* Tabel 3 bebas dari *multicollinearity confident interval* 95% dengan nilai *vif (uncentered)* di bawah 10 (3,66) serta bebas dari heteroskedastik.

Tabel 3 Hasil Regresi *Random Effect*

Variabel	Coef.	t-Stats	Prob.
SALKURUMI	2.43	3.36	0.001
lnKURBANKUM	79.23	4.86	0.000
JWIRAUsh	0.28	3.15	0.002
C	7150	13.63	0.000

Dependent Var.= IPMEC

Overall $R^2 = 0.5807$ Prob > F = 0.0001

Within $R^2 = 0.6202$

Between $R^2 = 0.6084$

Vif = 3,66

*) hasil lengkap pada lampiran

Sumber: Diolah Penulis

Melalui uji *hausman sigmamore* yang menspesifikasikan pada matriks kovarian berdasarkan estimasi gangguan varian (*disturbance*) dengan nilai Prob>Chi sebesar 0.1024 (*probability F* dan *Chi-square* > $\alpha = 5\%$) sehingga dinyatakan pilihan model regresi menggunakan *random effect*. Dengan hasil penentuan model uji dari *hausman sigmamore* tersebut maka uji *chow* otomatis terlewati.

Berdasarkan model *random effect* dengan menggunakan tiga variabel bebas dapat terlihat nilai koefisien pengaruh, yakni:

$$IPM = 7.150 + 2,43 \text{ SALKURUMI} + 79,23 \text{ ln(KURBANKUM)} + 0,28 \text{ JIWAUsh}$$

Dari persamaan model regresi tersebut, dapat menjawab pertanyaan yakni pembiayaan KUR dan UMi milik pemerintah yang disalurkan melalui perbankan yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan permodalan inklusi dalam rangka peningkatan taraf ekonomi masyarakat bawah agar berusaha mandiri memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia sektor ekonomi (pengeluaran). Namun nilai penyaluran KUR dan UMi tersebut masih memiliki pengaruh yang cukup kecil terhadap IPM dibandingkan dengan penyaluran kredit usaha (non subsidi) milik bank umum.

Pada sisi permintaan jumlah kreditur program penyaluran kredit pemerintah (KUR dan UMi) wilayah Maluku sesuai dengan hasil uji asumsi (*robust*) dan regresi OLS (*fixed effect*) atas variabel yang memiliki tingkat korelasi tinggi didapatkan model sebagai berikut:

$$\ln(\text{debitur KURUMi}) = -8,212 - 1,176 \ln(\text{jumlah bank umum}) + 0,456 \ln(\text{jumlahlembagapembiyaaan}) + 3,09 \ln(\text{jumlah koperasi})$$

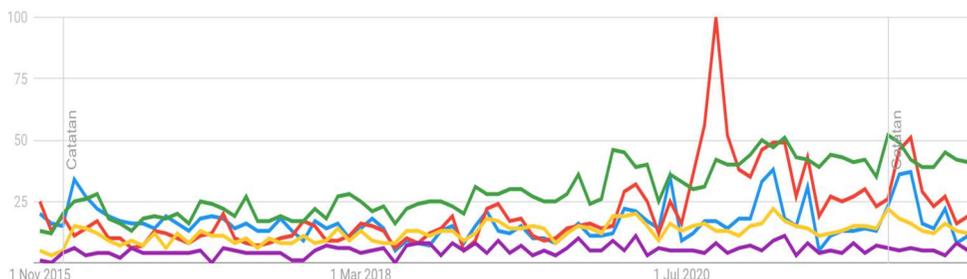
*) hasil lengkap pada lampiran

Dari model tersebut, jumlah koperasi memiliki kontribusi penting di dalam peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam program penyaluran kredit pemerintah. Sesuai dengan visualisasi *r-square slope* pada Grafik 4 dapat menjelaskan jumlah debitur program kredit pemerintah yang dapat dijelaskan dengan jumlah koperasi di wilayah Maluku yang menunjukkan hubungan positif.

Jika dilihat pada Grafik 5, jumlah koperasi yang beroperasi di wilayah Maluku mayoritas terkonsentrasi di Maluku Tengah dan Kota Ambon. Pada Grafik 5 terlihat ketimpangan di dalam sarana penyaluran kredit kepada masyarakat. Tingkat minat masyarakat atas penawaran program kredit pemerintah (KUR dan UMi) dapat dilihat dari *trend* pencarian informasi melalui media internet.

Di sisi lainnya, penelitian ini melihat keinginan masyarakat (*people interest*) dalam mencari informasi terkini terkait pembiayaan KUR dan UMi khususnya masyarakat yang terhubung dengan jaringan internet selama kurun waktu tujuh tahun terakhir secara nasional maupun di regional Maluku cukup meningkat tajam. Terlihat pada Grafik 6 dari *trend* pencarian (*search hit*) pada

Grafik 6 *Trend Search* atas Pembiayaan KUR dan UMi Wilayah Maluku (Google Data 2015 s.d 2022)



Sumber: Diolah Penulis

google mulai dari bulan Januari 2020 kemudian menurun kembali di bulan April 2020 selanjutnya terjadi *rebound* di akhir bulan Mei 2020 dengan titik puncak tertinggi terjadi di awal Januari 2022 serta nilai *sentiment* analisis pada Grafik 7 terkait KUR yang cenderung positif dan selalu mendapat *mention* atau perhatian dari media di internet (*twitter*, *berita*, *video*, *forum*, dan *podcast*). Hal tersebut menandakan bahwa pembiayaan KUR masih menjadi perhatian masyarakat di sisi penawaran kredit usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi positif antara IPM sektor ekonomi (pengeluaran) dengan penyaluran kredit milik perbankan, pemerintah, maupun jumlah wirausaha wilayah Maluku namun dengan tingkat koefisien yang berbeda. Nilai pengaruh

penyaluran kredit pemerintah (KUR dan UMi) cukup kecil dibandingkan dengan penyaluran kredit usaha milik perbankan umum.

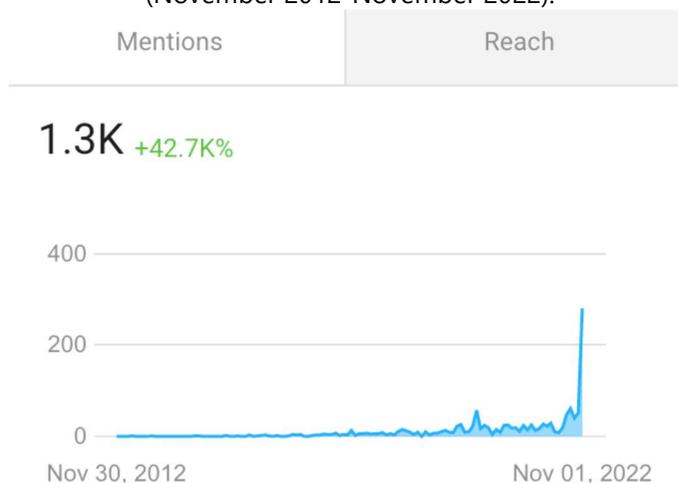
Selain itu, tingkat wirausaha wilayah Maluku tidak cukup mampu untuk menaikkan tingkat IPM sektor ekonomi dikarenakan memiliki nilai pengaruh yang sangat rendah.

$$\begin{aligned} \ln(\text{debitur KURUMi}) = & -8,212 -1,176 \\ & \ln(\text{jumlah bank umum}) + 0,456 \\ & \ln(\text{jumlah lembaga pembiayaan}) \\ & + 3,09 \ln(\text{jumlah koperasi}) \end{aligned}$$

Hasil menunjukkan elastisitas kenaikan jumlah debitur KUR dan UMi sebesar 1% maka akan terdapat kenaikan 3,09% jumlah koperasi sedangkan jumlah lembaga pembiayaan hanya meningkat 0,45%.

Terkait dengan pengaruh jumlah debitur program kredit pemerintah, jumlah koperasi menjadi salah satu

Grafik 7 *Sentiment Analysis* atas Pembiayaan KUR
 (November 2012-November 2022).



Sumber: Diolah Penulis

faktor penting di dalam kenaikan jumlah debitur selain dari jumlah lembaga pembiayaan di wilayah Maluku. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah bank umum yang terdapat di wilayah Maluku. Hal ini menjadi salah satu gambaran bahwa terdapat persaingan antara penyaluran antara KUR dan UMi milik pemerintah dengan kredit usaha milik korporasi perbankan secara umum maupun milik bank perkreditan rakyat dengan binaan atas dari masing-masing pihak bank. Dari sisi *trend* atas pencarian dan informasi terkait KUR, terjadi kenaikan yang cukup tinggi mulai dari pertengahan tahun 2020 sampai dengan saat ini (awal tahun 2022). Adapun untuk nilai permintaan UMi masih sangat kecil dan tidak ada permintaan informasi terkait UMi di wilayah Maluku. Dari hasil-hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa pembiayaan KUR khususnya wilayah Maluku masih sangat potensial untuk dikembangkan khususnya melalui koperasi dikarenakan persaingan dengan perbankan cukup tinggi. Selain itu, juga peran pembiayaan KUR milik pemerintah untuk regional Maluku (secara khusus) sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan ekonomi serta tingkat kewirausahaan masyarakat. Tingkat *awareness* masyarakat akan kebutuhan pembiayaan terjangkau melalui KUR masih sangat diminati khususnya pada periode ekonomi yang sedang buruk (dampak pandemi Covid-19). Walaupun bentuk KUR didesain mirip dengan produk perbankan yang terikat aturan-aturan *mikroprudentials*, peningkatan peran koperasi sebagai bagian dari mekanisme peningkatan penyaluran KUR milik pemerintah perlu dipertimbangkan karena selain dengan adanya alasan atas *margin* biaya atas

biaya penyaluran melalui koperasi dapat jauh lebih rendah dari perbankan juga dapat menyentuh hampir seluruh wilayah penduduk sampai level terbawah dikarenakan jumlah koperasi yang lebih banyak dibanding jumlah perbankan. Namun, perlu diperhatikan juga tingkat keamanan jaminan pembiayaan melalui koperasi jika terjadi kenaikan *non-performing loan* (NPL) dikarenakan sistem koperasi tidak memberikan pola pemberian jaminan keamanan atas dana tak tertagih sehingga perlu dikembangkan mekanisme tingkat jaminan atas NPL terhadap koperasi dalam rangka penyaluran KUR. Selain itu, program pemerintah khususnya KUR dan UMi dapat dikaji ulang agar sasaran untuk menanggulangi kemiskinan bisa tercapai, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program KUR dan UMi saja, tetapi secara tidak langsung program KUR dan UMi dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk miskin dengan UMKM.

Literasi kepada masyarakat mengenai penyaluran program KUR dan UMi kiranya bisa dilakukan lebih masif. Sehingga mempermudah masyarakat bisa mengakses program KUR dan UMi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini masih jauh dari kata cukup atau sempurna dikarenakan oleh keterbatasan penggunaan *sampling* dari data sekunder yang tersedia untuk masing-masing variabel yakni sekitar 70 data per variabel dengan rentang waktu mulai tahun 2015 sampai dengan 2021. Namun, jumlah tersebut masih memenuhi *standard* teorema limit pusat

(*central limit theorem*). Dengan terbatasnya jumlah sampel tersebut maka semakin minimal penggunaan metode analisis statistik serta sulit dalam pembentukan model yang mendekati populasi sehingga mayoritas mekanisme permodelan level lanjut (*clustering, countouring, bayessian modeling, dan VAR modeling*) tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, jumlah sampel semakin berkurang ketika dilakukan transformasi data untuk memperkecil nilai *varians* sampai titik minimum. Hal lain terkait penelitian yakni diperlukan penelitian riil dengan sumber data dari data primer untuk membuktikan maupun membandingkan hasil antara kondisi riil (sesuai dengan pengamatan responden) dengan data uji sekunder. Hal ini dapat menjadi komplemen di dalam mendapatkan hasil level pengetahuan yang lebih dalam (*deepened insight*) terkait kondisi penyaluran KUR dan UMi serta kaitannya dengan fakta kondisi masyarakat.

REFERENSI

- Adam, L. (2018). Pelibatan koperasi dalam program KUR: Sebuah inovasi kebijakan ekonomi dengan peluang dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(1), 21–46.
<https://doi.org/10.14203/JEP.26.1.2018.21-46>
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234–266.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>
- Fouejjieu, A., Sahay, R., Cihak, M., & Chen, S. (2020). Financial inclusion and inequality: A cross-country analysis. *the journal of international trade & economic development*, 29(8), 1018–1048.
<https://doi.org/10.1080/09638199.2020.1785532>
- Fox, J. (2015). *Applied regression analysis and generalized linear models (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
- Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: A panel data approach. *Empirical Economics*, 51(1), 291–314.
<https://doi.org/10.1007/s00181-015-1008-x>
- Muchlis, M. (2017). Kiprah UMKM ditengah krisis ekonomi, perannya besar, minim perhatian pemerintah. *Business Management Journal*, 2(1), 21–22.
<https://doi.org/10.30813/bmj.v2i1.581>
- Pang, B., & Lee, L. (2004). A sentimental education: Sentiment analysis using subjectivity analysis using subjectivity summarization based on minimum cuts. ACL. Cornell University.
- Raji, R. O. (2021). Testing the relationship between financial inclusion, institutional quality and inclusive growth for Nigeria. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 1(1), 18–28.
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku393>
- Sari, I. Z., & Falianty, T. A. (2021).

Financial inclusion and income inequality: Does financial structure matter? *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(1), 72–100.

<https://doi.org/10.29244/jekp.10.1.2021.72-100>

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, 24(8). 472-476.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development 11th edition*. London: Pearson.

Turney, P. D. (2002). Thumbs up or thumbs down? Semantic orientation applied to unsupervised classification of reviews. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Philadelphia. pp, 417-424.

Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2018). Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1–27. <https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.2015.1-27>

LAMPIRAN

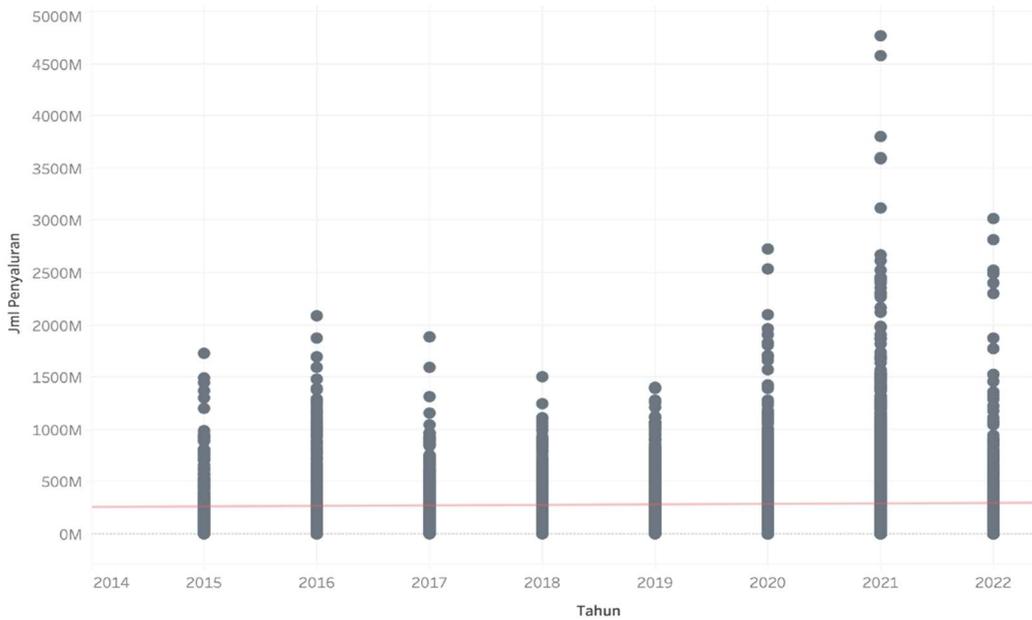
Lampiran 1 Tabel Deskripsi Statistik 20 Variabel Regresi

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min.	Max
YEAR	77	2018	2.013155	2015	2021
KDWIL	77	6	3.183014	1	11
WIL	0				
DEBKURUMI	77	2124.948	2397.362	0	10958
SALKURUMI	77	5.33e+10	5.79e+10	0	2.74e+11
IPMEC	77	8510.351	2134.702	5697	14233
JBANKUM	77	10.75325	8.217689	3	34
JBPR	77	1.532468	0.7709259	0	3
JLPemb	77	2.662338	6.118588	0	28
KURBANKUM	77	50088.77	70796.73	8	358348
MIKROBANKUM	77	99298.1	105484.6	1696	501963
KECILBANKUM	77	140427.5	218606.4	0	1125117
NENGAHBANKUM	77	78726.86	175601.6	0	694462
JKOP	77	300.7792	185.6595	136	782
PDRBKap	77	15.55474	4.52572	9.171378	30.46
PersenMISKIN	77	21.91792	6.868414	4.38	31.58
JUsMiCiL	77	1172.844	732.5623	406	4493
JTkMiCiL	77	3679.623	2557.747	755	11289
JIndKrajInF	77	24.23377	12.82667	1	55
JIndKrajiNF	77	53.67532	23.20245	1	123
INReg	77	1.073766	0.7854416	0.07	2.37
GINIR	77	0.3272857	0.0094533	0.316	0.344
JTKProdOlah	77	5119.299	4682.499	47	19678
JTKPdgrtl	77	11228.43	15273.43	841	66242
JWIRAUsh	77	16847.83	15228.89	3727	55500
lnIPMEC	77	9.021799	0.2281863	8.647695	9.563318
logIPMEC	77	9.021799	0.2281863	8.647695	9.563318
lnSALKURUMI	75	23.95789	1.51536	18.85894	26.33617
lnINReg	77	-0.3629856	1.072046	-2.65926	0.8628899
sqINReg	77	1.761881	1.859161	0.0049	5.6169
lnPDRBKab	77	2.704867	0.2808009	2.216088	3.416414
INReg_lag1	76	1.068947	0.7895139	0.7	2.37
INReg_lag2	75	1.081067	0.7876814	0.7	2.37
lnINReg_l~1	76	-0.3725596	1.07585	-2.65926	0.8628899
lnKURBANKUM	77	9.455164	2.236804	2.079442	12.78926
SALKURUMI_~1	76	5.37e+10	5.82e+10	0	2.74e+11

InSALKURUM~1	74	23.96279	1.525106	18.85894	26.33617
KURBANKUM_~1	76	50687.01	71070.95	8	358348
InKURBANKU~1	76	9.46854	2.248565	2.079442	12.78926
SALKURUMI_~2	75	5.43e+10	5.84e+10	0	2.74e+11
InSALKURUM~2	73	23.79266	1.533282	18.85894	26.33617
InJBANKUM	77	2.160057	0.6281629	1.098612	3.526361
InJBPR	74	0.3732656	0.4266812	0	1.098612
InJKOP	77	5.555802	0.5242682	4.912655	6.661855

Sumber: Diolah Penulis

Grafik 8 Scatterplot jumlah penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)



Sumber: Diolah Penulis